

**KONSUMEN DAN PARKIR:**

**Studi Tentang Pertimbangan dari Hakim tentang Klausula  
Eksonerasi dalam Perjanjian Baku**

**NASKAH PUBLIKASI**



**OLEH**

**DIAN TRI BEKTI**

**C 100090165**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juli 2013

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, S.H, M.Hum)

Pembimbing II



(Moh. Sandjoyo, S.H, M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H, M.Hum)

## **ABSTRAK**

Nama : Dian Tri Bekti

NIM : C 100 090 165

Progam Studi : Sarjana Hukum

Judul : **KONSUMEN DAN PARKIR (Studi Tentang Pertimbangan Dari  
Hakim Tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku)**

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa perjanjian serta klausul baku dalam perparkiran. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang ada di dalam kendaraan. Kemudian penelitian ini menjabarkan parkir dengan metode terlebih dahulu menetapkan perjanjian parkir sebagai perjanjian penitipan berdasarkan karakteristiknya dan kemudian menguraikan hal tersebut sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian perparkiran berdasarkan KUH Perdata. Serta dalam skripsi ini juga membahas mengenai adanya pelanggaran dalam dasar hukum yang dijadikan perlindungan bagi pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Perda tersebut dijadikan tameng oleh pelaku usaha agar terhindar dari tanggung jawabnya. Klausula tersebut merugikan konsumen, karena jika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka seharusnya keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis menjabarkan beberapa permasalahan: Pertama pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir dan kedua keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir.

Kata Kunci : Parkir, Ganti Rugi, Konsumen

## **ABSTRACT**

Name : Dian Tri Bekti

NIM : C 100 090 165

Study : Program Bachelor of Laws

Title : CONSUMER AND PARKING (Studies Consideration Of Justice on  
Exoneration Clause in the Agreement Raw)

The focus of this study is to analyse standard clause in the agreement as well as parking. It arises because of the loss and damage to vehicle or loss of items in the vehicle. This study then outlines parking method to first set the parking agreement as care based on their characteristics and then outlines such things as the rights and obligations of each party in the parking agreement based on the Civil Code. As well as in this paper also discusses the basis of violation of law which is used as protection for parking management particularly in the Jakarta Regulation No. 5 of 1999 concerning parking. The law shields used by businesses to avoid their responsibilities. The clause harm consumers, as if referring to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, then it should be the safety and comfort is one of the elements that must be met by businesses. Therefore, in this paper the author describes some of the problems. First, legal reasoning of the judge in determining the binding strength of exoneration clauses are made in the form of raw, in the parking agreement and both the judge's decision in favor of the consumer is involved in the exoneration clause which is made in the form of raw, in the parking agreement.

Keyword : Parking, Compensation, Consumer

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Kendaraan tidak terlepas dari parkir. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus-menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir.

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Di samping menggiurkannya bisnis perpakiran, pada praktiknya tidak terlepas dari masalah. Perpakiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik pada konsumen, pengelola parkir bahkan pemerintah daerah.

Namun dalam kenyataan di kehidupan sekarang ini konsumen tempat parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraannya maupun barang yang dalam kendaraan maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir. Dalam kasus semacam ini, pengelola

parkir biasanya merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir di tempatnya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah klausula eksonerasi seperti diatas bisa dianggap sah.

Perjanjian atau klausula baku merupakan perjanjian yang formatnya sudah dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain tinggal menyetujui saja. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.<sup>1</sup> Dalam praktek kegiatan usaha, perjanjian baku dibuat oleh pelaku usaha, sedangkan konsumen sebagai pihak lain yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian yang dimaksud. Pada karcis kendaraan bermotor yang dibuat oleh pelaku usaha, klausula baku yang masih sering dijumpai adalah kalimat bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan. Padahal menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) sub a UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Namun yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah masih rendahnya kesadaran semua pihak dalam menegakkan peraturan ini, terutama kalangan pelaku

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama, 2003), hal 53

usaha. Dapat dilihat di berbagai tempat usaha di Jakarta yang menyediakan jasa parkir, masih banyak dijumpai adanya klausula baku dalam karcis tanda parkirnya. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak atau belum menyadari adanya larangan pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan UUPK. Di lain pihak, seharusnya konsumen juga harus mampu mensikapi setiap klausula baku dan segala ketidakadilan terhadap konsumen dengan sikap kritis. Berbagai cara bisa dilakukan konsumen, mulai dari melayangkan protes dan kritik langsung ke pelaku usaha, mengumumkan lewat media, atau mengadukan kepada lembaga konsumen atau pihak yang berwenang, bahkan melalui gugatan di pengadilan apabila sampai menimbulkan kerugian.

Lebih ironisnya lagi, klausula baku di bidang perpajakan ternyata dilegalkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perda No 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Pasal 36 ayat (2) Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 1999 menyatakan: *“Atas hilangnya kendaraan dan/atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di dalam petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir”*. Namun dalam putusan kasasi kasus Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan yaitu No. 1264/K/Pdt/2005 MA menyatakan bahwa ketentuan pasal dalam Perda tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan KUHPdata pasal 1320 tentang asas kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dan juga pasal 18 ayat (1) huruf a UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir?
- b. Bagaimanakah keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir?

## **3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

- a. Tujuan Objektif
  - 1) Mendiskripsikan pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir
  - 2) Mendiskripsikan keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir .
- b. Tujuan Subjektif
  - 1) Manfaat subjektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum perlindungan konsumen, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai



derajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi kajian konsumen dan parkir, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah parkir.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun kebijaksanaan dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang parkir.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. HASIL PENELITIAN**

**a. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Menentukan Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi yang Dibuat Dalam Bentuk Baku, Dalam Perjanjian Parkir**

**1). Putusan Pengadilan Negeri No : 551/PDT.G/ 2000 / PN.JKT.PST (Kasus Sengketa Parkir Antara Anny R. Gultom, Huntas Tambunan melawan PT. Securindo Packatama Indonesia)**

**(a). Pertimbangan hakim**

- (1) Menimbang bahwa yang menjadi persoalan bagaimana dengan klausul atau ketentuan yang tertera dalam karcis parkir maupun pada papan yang terpancang didepan pintu masuk area parkir yang berbunyi : “ *Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)*”.
- (2) Menimbang bahwa disamping itu juga karena pengelolaan parkirnya dikelola secara professional dan secure parking maka tanggung jawab itu merupakan jaminan bagi para pemakai jasa parkir.

Sedangkan ketentuan PERDA No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran menurut majelis tidak mengurangi hak para pengguna jasa parkir untuk menuntut jika pihaknya dirugikan oleh adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pihak pengusaha yang menyelenggarakan perparkiran secara professional oleh Secure Parking.

**(b). Alat Bukti**

- (1). Alat bukti dari Penggugat:

- i). STNK No. 885166 atas nama Penggugat
- ii). BPKB atas nama Penggugat
- iii). Karcis Parkir Plaza Cempaka Mas, No. Polisi kendaraan yang masuk, No. A 1204 AA , pukul 17:38:01, tertanggal 1 Maret 2000
- iv). Saksi dari Beatrik Siahaan memberikan kesaksian bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2000 ke Carefour Plaza Cempaka Mas, Jakarta Pusat, bahwa setelah selesai belanja di Carefour lalu keluar dan ternyata mobil yang diparkir didepan supermarket tidak ada dan bahwa ternyata karcis tanda parkir kendaraan tersebut salah tulis/cetak oleh petugas parkir yaitu B 2555 SD yang seharusnya B 255 SD.
- v). Saksi dari Drs. Berman Tambunan memberikan kesaksian bahwa benar kurang lebih pukul 17.00 Penggugat menelpon kerumah menerangkan bahwa mobilnya tidak ada di tempat parkir dan saksi telah berusaha mencari bersama-sama dengan petugas parkir tetapi belum dapat diketemukan.

(2). Alat bukti dari Tergugat :

- i). Foto copy sesuai dengan aslinya berupa tiket parkir
- ii). Foto copy gambar/foto (poscard) ukuran 3R tentang Ketentuan Umum Perparkiran.

**2). Putusan Pengadilan Negeri No : 345/PDT.G/ 2007 / PN.JKT.PST  
(Kasus Sengketa Parkir Sumito Y. Viansyah Melawan PT. Securindo  
Packtama Indonesia).**

**(a). Pertimbangan Hukum**

- (1). Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir yang dikeluarkan Tergugat yang berisi:

“Asuransi kendaraan dan barang-barang yang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang yang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir)”.

- (2). Menimbang bahwa pencantuman klausula baku tersebut bertentangan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang diajukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

(a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

**b. Keputusan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Konsumen Yang Terlibat Dalam Klausula Eksonerasi Yang Dibuat Dalam Bentuk Baku, Dalam Perjanjian Parkir.**

**1). Putusan Pengadilan Negeri No : 551/PDT.G/ 2000 / PN.JKT.PST (Kasus Sengketa Parkir Antara Anny R. Gultom, Huntas Tambunan melawan PT. Securindo Packatama Indonesia)**

Bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yaitu menyatakan bahwa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi : “Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan

kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir).

5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

**2. Putusan Pengadilan Negeri No : 345/PDT.G/ 2007 / PN.JKT.PST  
(Kasus Sengketa Parkir Sumito Y. Viansyah Melawan PT.  
Securindo Packtama Indonesia).**

Bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yaitu menyatakan bahwa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 30.950.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi : “Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir).

## **2. PEMBAHASAN**

### **a. Pertimbangan Hakim Tentang Perjanjian Penitipan Barang**

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perpajakan adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur di dalam Pasal 1964 KUH Perdata yang berbunyi: <sup>2</sup>

*“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”*

---

<sup>2</sup> David M. L Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Jakarta, Timpani, 2007, hal 18

Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata yaitu diserahkan barang yang dititipkan jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>3</sup>

Kewajiban penerima titipan diatur dalam pasal 1706 dan 1714 KUH Perdata yang berbunyi:

- a) *Diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memeliharanya dengan sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri (Pasal 1706 KUH Perdata)*
- b) *Diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya (Pasal 1714 KUH Perdata)*

Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan kewajiban penerima titipan harus memelihara barang yang dititipkan padanya, mengembalikan barang yang sama setelah menerimanya dan diwajibkan mengembalikan barang yang dititipkan.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No : 551/PDT.G/ 2000 / PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Negeri No : 345/PDT.G/2007/ PN.JKT.PST hakim

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,



mempertimbangkan bahwa penyebab hilangnya Mobil Penggugat I yang diparkirkan Penggugat II di area perpakiran Carrefour Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat jelas disebabkan karena kelalaian, kurang hati-hatian serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai/bawahan Tergugat, baik di pintu masuk, petugas dalam areal parkir maupun tugas yang berjaga di pintu keluar, dengan uraian sebagai berikut :

- (1) Pegawai/bawahan Tergugat yang berjaga dipintu masuk melakukan kesalahan pencatatan nomor mobil Penggugat yang seharusnya B 255 SD, tetapi dicatat B 2555 SD, sehingga akibat kesalahan pencatatan tersebut membuka kemungkinan terjadinya pencurian mobil
- (2) Bahwa sekalipun Penggugat II telah melaporkan tentang hilangnya mobil yang Penggugat II parkiran di area perpakiran Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh Tergugat (vide bukti PII-2), namun demikian para Pegawai Tergugat tidak melakukan upaya yang maksimal untuk mencari kendaraan tersebut. Padahal berdasarkan fakta dilapangan, mobil tersebut baru keluar dari areal perpakiran yang

dikelola Tergugat, kurang lebih 1,5 jam setelah dibuatkan Berita Acara Kehilangan oleh Pegawai Tergugat

(3) Bahwa karcis parkir bernomor polisi A 1204 AA (vide bukti PII-3) diakui kebenarannya dicetak oleh Penggugat namun sampai saat ini Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa ada mobil yang bernomor B 1204 AA pada saat itu. Dari hal tersebut jelas terbukti bahwa ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mencetak karcis parkir untuk dipergunakan melakukan perbuatan melawan hukum yang akhirnya merugikan para Penggugat, dan dapat disimpulkan pencetakan karcis ini dilakukan oleh pegawai Tergugat dengan menggunakan alat perangkat computer milik Tergugat

(4) Terlihat jelas dan nyata bahwa pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar mengetahui dan menyaksikan sendiri mobil yang mencurigakan, keluar melewati pintu penjaganya dengan terburu-buru tapi dia tidak berupaya untuk mencegahnya. Apalagi orang tersebut bisa lolos dari pintu penjagaan dengan menggunakan karcis parkir yang berbeda dengan karcis nomor polisi yang tertera di plat mobil tersebut. Dari sini terlihat jelas bahwa pegawai

Tergugat telah melakukan kesalahan besar dan fatal sehingga merugikan para penggugat. Perbuatan pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar yaitu tidak meneliti dan menyesuaikan terlebih dahulu antara nomor mobil dengan karcis tanda masuk, serta membiarkan mobil tersebut keluar dari areal parkir adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya telah terbukti.

Bahwa hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya melihat konstruksi hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian penitipan barang yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dimana dalam hal ini Penggugat (pemberi titipan) menyerahkan barangnya (mobilnya) dibawah pengawasan Tergugat (penerima titipan) dengan membayar sejumlah uang dan Penggugat (pemberi titipan) menerima bukti penitipannya berupa “karcis parkir”, dan siapapun tidak boleh mengambil mobil tersebut tanpa menunjukkan bukti “karcis parkir” atau bukti STNK bila hendak keluar dari areal parkir. Bahwa ketentuan hukum yang mengatur perihal penitipan barang adalah Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi : “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya

dan mengembalikannya dalam wujud asalnya “. Bahwa pasal 1706 KUHPerdato Jo Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata lebih menegaskan bahwa si perima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang diterimanya”, dengan demikian menjadi sangat jelas perjanjian penitipan barang pada hakekatnya adalah merupakan “perjanjian riil” yaitu baru terjadi manakala telah dilakukan perbuatan nyata diserahkannya barang yang dititipkan. Bahwa konstruksi hukum inilah yang melandasi pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap konsumen parkir, yakni mengembalikan kendaraan/mobil di areal menjadi tanggungjawab pengelola parkir.

Bahwa pernyataan hakim diatas telah sesuai dengan norma yaitu pasal Pasal 1694 KUH Perdata mengenai hakekat perjanjian penitipan serta pasal 1706 KUHPerdato Jo Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata mengenai kewajiban penerima titipan, maka dapat disimpulkan dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa Putusan Nomor 551/PDT.G/ 2000 / PN.JKT.PST mengenai Gugatan Sengketa Parkir mendasarkan pada perjanjian penitipan barang yangmana merujuk pada kewajiban penerima barang, dimana dalam hal tersebut Tergugat dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai penerima barang.

Bahwa pada dasarnya hakim dalam mempertimbangkan hukumnya telah sesuai dengan norma yaitu pasal mengenai perjanjian penitipan barang yaitu pasal 1694 KUH Perdata dan 1706 KUHPerdata Jo Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata tentang kewajiban seorang penerima titipan. Karena dalam sengketa parkir tersebut konstruksi dalam perjanjian parkir adalah perjanjian penitipan karena Penggugat (pemberi titipan) telah menitipkan barangnya berupa mobil kepada Tergugat (penerima titipan) dengan adanya bukti karcis parkir yang diberikan oleh Tergugat (penerima titipan) kepada Penggugat (pemberi titipan). Dalam sengketa tersebut Tergugat (penerima titipan) dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan yaitu merawat barang yang dititipkan padanya.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan diatas pada bagian pertimbangan hukumnya, hakim mengkualifisir perjanjian antara pengelola parkir dengan konsumen sebagai perjanjian penitipan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Tergugat terbukti telah membiarkan mobil Penggugat dibawa keluar areal parkir tanpa pemeriksaan karcis parkir, yang artinya sikap ketidaktelitian dan ketidak hati-hatian tergugat membuat Tergugat melanggar kewajiban hukumnya untuk menjamin keamanan kendaraan milik Penggugat.

## **b. Pertimbangan Hakim Tentang Klausula Baku Dalam Perjanjian Parkir**

Pencantuman perjanjian baku pengalihan tanggung jawab terdapat dalam Pasal 36 ayat 2 Perda Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

*“Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir”<sup>4</sup>*

Pasal tersebut sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna jasa apalagi jika diteliti lebih lanjut ayat 2 pasal 36 tersebut dijadikan benteng oleh Pengelola Parkir bertentangan dengan pasal 36 ayat 1 yang berbunyi:

*“Pengelola dan penyelenggara perpakiran, wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir, dan menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan”*

Serta penjelasan pasal 36 ayat 3 yang berbunyi:

*“Penyelenggara Perpakiran bukan berarti terlepas tanggung jawabnya, yaitu memelihara keamanan di seluruh lokasi tempat parkir yang diselenggarakannya, sebagai upaya pencegahan atas kehilangan dan kerusakan”*

---

<sup>4</sup> Pasal 36 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999

Dari isi pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.5 Tahun 1999 serta penjelasannya terlihat jelas adanya kontradiksi serta pertentangan pengertian antara ayat 1, 2 dan 3 yang satu sama lain tidak saling mendukung. Dari kenyataan ini walaupun Perda tersebut merupakan hukum positif bagi usaha perparkiran namun tidak memenuhi unsur-unsur sahnyanya perjanjian dan tidak memenuhi asas keseimbangan dan kesetaraan dalam berkontrak sehingga keberlakuannyapun harus dikoreksi khususnya mengenai klausula tentang pengalihan tanggung jawab (pasal 36 ayat 2) harus dihilangkan.<sup>5</sup>

Sebenarnya tidak semua isi Perda No.5 Tahun 1999 cacat secara hukum, terutama jika diparalelkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa poin bahkan bernilai positif terhadap perlindungan jasa konsumen parkir, misalnya:

Pertama disebutkan dalam Pasal 36 ayat 1 Perda No. 5 Tahun 1999:

*“pengelola dan peyelenggara perparkiran wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir, dan menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan”.*

---

<sup>5</sup> David Tobing, op.cit. hlm 46.

Artinya, jika kendaraan konsumen hilang dan atau rusak, berarti pengelola parkir telah gagal memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menjaga keamanan lokasi parkir.<sup>6</sup>

Kedua, penyelenggara perpakiran dapat melakukan kerjasama dengan lembaga asuransi atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan, dengan besarnya premi asuransi yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah (Pasal 36 ayat 3). Jika ini dilakukan, tentu saja pihak pengelola parkir tidak perlu repot-repot untuk mengganti rugi, jika kendaraan konsumen hilang/rusak.<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pengalihan tanggungjawab menurut UUPK adalah bilamana pada klausula baku menyatakan pelaku usaha tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu atas barang atau jasa yang sebenarnya merupakan tanggungjawabnya.

Sampai saat inipun pengelola jasa parkir pada umumnya masih mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen pada karcis khususnya mengenai pengalihan tanggungjawab. Klausula baku tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan bahwa dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan pelaku usaha

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> *Ibid.*,



dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian yang isinya menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.

Yang dimaksud pengalihan tanggungjawab adalah bilamana pada klausula baku menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu atas barang atau jasa yang sebenarnya merupakan tanggung jawabnya.

Sanksi terhadap pelanggaran klausula baku yang menulis ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Disebutkan dalam pasal 18 ayat (3) bahwa setiap klausula baku yang memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Pernyataan batal demi hukum harus diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri oleh konsumen yang dirugikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka seharusnya:

- a. Pengelola jasa perpakiran tidak mencantumkan klausula baku pada karcis parkir yang menyatakan pengalihan tanggungjawabnya.
- b. Mencantumkan dengan jelas, tariff parkir pada loket parkir.
- c. Segera menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Selain sudah dilarang dan dinyatakan batal demi hukum oleh UUPK, pengawasan dan larangan terhadap perjanjian baku di Indonesia juga dilakukan oleh pengadilan melalui putusan hakim. Peran hakim sangat penting untuk menilai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku serta konsekuensi yang timbul.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 551/PDT.G/2000 / PN.JKT.PST dan 345/PDT.G/ 2007/ PN.JKT.PST hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi persoalan bagaimana dengan klausul atau ketentuan yang tertera dalam karcis parkir maupun pada papan yang terpancang didepan pintu masuk area parkir yang berbunyi :

“ Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)”.

Bahwa hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya melihat adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dengan alasan Perda No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran

khususnya pasal 36 ayat 2. Padahal pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab seperti yang pelaku usaha tersebut lakukan tidak diperbolehkan dan dianggap cacat hukum. Yangmana dalam pasal tersebut pihak pengelola parkir tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan terhadap kendaraan yang diparkirkan. Hal tersebut sangat merugikan pihak konsumen selaku pihak yang dirugikan. Padahal di dalam aturan pasal 36 ayat 1 dan 3 Perda Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pengelola perparkiran wajib memberikan keamanan kepada pemakai parkir. Selain itu dalam peraturan Pasal 18 UUPK pun khususnya ayat 1 huruf a pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan pihak konsumen dengan maksud tanggung jawab yang dialihkan. Maka dalam hal ini Perda Nomor 5 Tahun 1999 bertentangan dengan UUPK khususnya pasal 18 karena kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada perda tersebut.

Bahwa pernyataan hakim diatas telah sesuai dengan norma yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang perparkiran pasal 32 ayat 1 dan 3 serta UUPK pasal 18 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa Putusan Nomor 551/PDT.G/ 2000 / PN.JKT.PST mengenai Gugatan Sengketa Parkir mendasarkan pada pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen dengan dasar Perda No. 5 tahun 1999 tentang Perparkiran, padahal Perda tersebut sesungguhnya cacat

hukum karena dianggap klausul bakunya sangat merugikan pihak konsumen serta untuk lebih menguatkan alasan pertimbangan hukum tersebut hakim mengungkapkan pasal 18 ayat 1 huruf a UUPK mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Perda nomor 5 Tahun 1999 yaitu menyatakan bahwa apabila pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen maka dianggap klausula tersebut cacat hukum atau batal demi hukum.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku atau klausula baku yang formatnya sudah dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain tinggal menyetujui saja. Dalam praktek kegiatan usaha misalnya parkir perjanjian baku dibuat oleh pelaku usaha sedangkan konsumen sebagai pihak yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut. Pada karcis kendaraan (mobil/motor) yang dibuat oleh pelaku usaha klausula baku yang masih dijumpai adalah kalimat bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dititipkan. Padahal menurut ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf a UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

**C. Keputusan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Konsumen Yang Terlibat Dalam Klausula Eksonerasi Yang Dibuat Dalam Bentuk Baku, Dalam Perjanjian Parkir.**

Kewajiban penerima titipan diatur dalam pasal 1706, 1714 dan 1715 KUH Perdata yang berbunyi:

- 1) *Diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memeliharanya dengan sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri (Pasal 1706 KUH Perdata)*
- 2) *Diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya (Pasal 1714 KUH Perdata)*
- 3) *Hanya diwajibkan mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaannya pada saat pengembalian itu (Pasal 1715 KUH Perdata)*

Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan kewajiban penerima titipan harus memelihara barang yang dititipkan padanya, mengembalikan barang yang sama setelah menerimanya dan diwajibkan mengembalikan barang yang dititipkan.

Hak penerima titipan terdapat dalam pasal 1729 KUH Perdata yaitu:

*Berhak untuk menahan barangnya hingga segala apa yang harus dibayar kepadanya karena penitipan tersebut, telah dilunasi.*

Maksud dari isi pasal diatas bahwa seorang penerima titipan berhak untuk menahan barang yang dititipkan oleh penitip kepadanya sampai penitip membayar lunas biaya penitipan kepada penerima titipan, jika penitip tidak membayar lunas maka penerima titipan berhak untuk menahan barang yang dititipkan oleh penitip kepada penerima titipan.

Kewajiban Pemberi Titipan terdapat pada pasal 1728 KUH Perdata yaitu:

- 1). Mematuhi segala peraturan yang ada di tempat titipan*
- 2) Diwajibkan mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan barang yang dititipkan*

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa penitip berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang ada di tempat penitipan yang khususnya diadakan oleh penerima titipan selama hal tersebut tidak menimbulkan kerugian pada penitip. Dan berkewajiban mengganti segala biaya kepada penerima titipan guna menyelamatkan barang yang dititipkan kepada penerima titipan.

Hak Pemberi Titipan terdapat pada Pasal 4 UUPK yang menyebutkan:

- 1) Hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang yang dititipkan*
- 2). Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi barang yang dititipkan*
- 3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya apabila penitip mengalami kerusakan pada barang yang dititipkan*
- 4) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*

Hak pemberi titipan di dalam perjanjian barang bisa disamakan dengan hak konsumen yang mana terdapat dalam UUPK yaitu Pasal 4. Setiap konsumen/penitip berhak mendapatkan kenyamanan dan keselamatan atas barang yang dititipkan kepada penerima titipan/pelaku usaha, jika mengalami kerusakan ataupun hilang maka penerima titipan harus bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Dan pemberi titipan berhak untuk didengar semua keluhannya apabila penitip mengalami kehilangan barang. Serta juga harus dilayani secara adil tidak diskriminatif.

Sedangkan tanggungjawab salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi yaitu :

Maka dapat diambil kesimpulan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Biasanya kebanyakan pihak yang sering melakukan wanprestasi tersebut adalah pihak penerima titipan. Misalnya apabila penerima titipan telah lalai untuk mengembalikan barang yang

dititipkan dan apabila barang yang dititipkan mengalami kekurangan, maka yang harus dilakukan oleh penerima titipan tersebut adalah:

- 1) Memberi ganti rugi (yang meliputi biaya, rugi dan keuntungan yang diharapkan)
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Pemutusan perjanjian
- 4) Memberi ganti rugi dan pembatalan perjanjian
- 5) Memberi ganti rugi dan pemutusan perjanjian<sup>8</sup>

Menurut J.Satrio didalam bukunya menjelaskan dalam Pasal 1238 BW mengajarkan kepada kita bahwa keadaan lalainya debitur berkaitan dengan masalah “perintah” yang dituangkan secara tertulis. Kata “Perintah” mengandung suatu peringatan. Karena disana dikatakan bahwa perintah/peringatan itu ditujukan kepada debitur (penerima titipan), dan debitur adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, tentunya perintah itu datang dari kreditur (pemberi titipan) yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak tuntutan atas prestasi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kelik Wardiono, op.cit. hlm 66

<sup>9</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung, 2012, hal 26.



Bahwa berdasarkan putusan nomor 551/PDT.G/2000/ PN.JKT.PST dan 345/PDT.G/2007/ PN.JKT.PST bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yaitu menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk tidak mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat tetepi dialihkan kepada penggugat.

Bahwa putusan hakim tersebut telah sesuai dengan norma yaitu Pasal 1706, 1714 dan 1715 KUH perdata yangmana pasal tersebut menyatakan kewajiban penerima titipan tapi pada kenyataannya dalam sengketa parkir tersebut penerima titipan (Tergugat) tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga kendaraan yang dititipkan oleh pemberi titipan (Penggugat) kepada penerima titipan (Tergugat) selain itu doktrin menurut J. Satrio mengenai tanggung jawab seseorang apabila wanprestasi yangmana bahwa Tergugat disitu adalah sebagai penerima titipan yangmana mempunyai tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan oleh pemberi titipan. Tapi dalam kenyataannya penerima titipan telah lalai atas kewajibannya dan dianggap wanprestasi maka dari itu penerima titipan (Tergugat) harus bertanggung jawab atas

kesalahan yang diperbuatnya dengan mengganti kerugian kepada pemberi titipan (Penggugat).

Dari pernyataan diatas mengenai kewajiban pihak dalam perjanjian penitipan khususnya perjanjian parkir yaitu penerima titipan pada dasarnya kebanyakan pelaku usaha khususnya perparkiran di kota-kota besar seperti Jakarta masih rendah dalam menjalankan peraturan yaitu menjalankan kewajibannya yaitu memberi keamanan dan rasa nyaman pada konsumen yang parkir di areal parkirnya. Padahal apabila ada konsumen yang parkir di areal parkirnya seharusnya menjaga kendaraan yang dititipkan padanya dikarenakan pemberi titipan memberi kepercayaan untuk menjaga kendaraannya kepada penerima titipan untuk tidak sampai mengalami kerusakan atau kehilangan tapi pada kenyataan mengenai sengketa parkir diatas akibat dari kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh penerima titipan diakibatkan oleh kesalahan dari penerima titipan itu sendiri.

## **C. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

**a) Pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir**

Pertimbangan hakim di dalam putusan No. 551/PDT.G/ 2000/PN.JKT.PST dan putusan No. 345/PDT.G/2007/PN.JKT.PST telah mempertimbangkan aspek-aspek, Perjanjian penitipan dan Klausul Baku. Hal ini telah sesuai Pasal 1694 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) sub a, akan tetapi tidak mempertimbangkan aspek peraturan Perda Tentang Perparkiran nomor 5 Tahun 1999 khususnya pasal 36 ayat 2.

**b) Keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir**

Keputusan hakim di dalam putusan No. 551/PDT.G/ 2000/PN.JKT.PST dan putusan No. 345/PDT.G/ 2000/PN.JKT.PST telah mengabulkan tuntutan penggugat berupa: telah sesuai dengan pasal 1706 KUH Perdata jo 1714 ayat (1) KUH Perdata dan ketentuan pasal 18 ayat (1) sub a UUPK mengenai ketentuan pencantuman klausula baku dan pendapat J. Satrio.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

David M.L. Tobing, Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir, Timpani, 2007.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT Gramedia, Pustaka Utama. 2003.

J.Satrio, Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2012.

Kelik Wardiono, Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta : FH UMS .2005.

Kelik Wardiono, Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007.

Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2004.

Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press. 1986.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran

Undang-Undang tentang Lalu Lintas Jalan Raya Nomor 14 Tahun 1992

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Website :

Suara Karya Online, DPRD Minta Manajemen BP Parkir DKI Dibenahi, tanggal 4 April 2006 Beritajakarta.com. Komisi B DPRD DKI Minta Manajemen BP Parkir Dibenahi, tanggal 10 Maret 2006.